

BAB V

KESIMPULAN

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa, sejak tahun 1990 perdagangan manusia di Thailand sudah terjadi dan melibatkan 80.000 korban. Perdagangan manusia telah menjadi masalah serius di Thailand dan menjadi tindak kriminal transnasional. Sesuai dengan teori transnasional, perdagangan manusia di Thailand sudah melintas batas negara, serta melibatkan banyak individu dengan skala internasional.

Sedangkan untuk penggunaan teori kerjasama internasional dibuktikan dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah Thailand untuk menanggulangi perdagangan manusia, diantaranya dalam bentuk upaya internal dan upaya eksternal.

Bentuk upaya internal yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia menjangkau wilayah *intern* (dalam negeri) Thailand. Upaya tersebut adalah (1) pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan manusia, (2) pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, (3) melakukan penegakan hukum terkait perdagangan manusia, (4) melakukan kerjasama dengan agensi

pemerintah lokal, (6) melakukan kerjasama dengan institusi akademik dan masyarakat sipil.

Selain upaya internal, pemerintah Thailand juga melakukan upaya eksternal yang melibatkan aktor internasional. Upaya eksternal ini menjangkau wilayah ekstern (luar negeri) Thailand. Upaya tersebut diantaranya adalah (1) melakukan kerjasama internasional dengan negara lain, (2) melakukan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah internasional, (3) bekerja sama dengan agensi PBB.

Selain upaya di atas, pemerintah Thailand juga melakukan pencegahan terhadap tindak kriminal transnasional ini. pencegahan yang dilakukan mencakup wilayah dalam negeri Thailand. Beberapa pencegahan yang dilakukan diantaranya adalah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program melawan perdagangan manusia, pembuatan komite-komite khusus untuk melawan perdagangan manusia, dan pemberian program pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah Thailand juga melakukan pemberantasan terhadap perdagangan manusia yang telah terjadi. Pemberantasan ini bertujuan untuk melemahkan dan melumpuhkan para pelaku dan jaringan mereka dengan cara memenjarakan mereka, agar tidak menngulangi tindakan ini pada korban lain. Proses kriminalisasi telah dilakukan pemerintah Thailand terhadap kasus ini. Dalam praktiknya pemerintah Thailand juga dihadapkan pada hambatan dan tantangan. Karena itulah pemerintah Thailand memerlukan pengembangan